

HARMONISASI STANDAR AKUNTANSI INTERNASIONAL DAN DAMPAK PENERAPAN DARI ADOPSI PENUH IFRS TERHADAP PSAK

Saiful Muchlis

Jurusan Akuntansi UIN Alauddin, Jln. Sultan Alauddin No.36, Gowa
saiful_putramuchlis@yahoo.com

ABSTRACT

IFRS (International Financial Reporting Standards) is a globally accepted compilation of guidelines for financial statement. Formation is fairly long history of the formation of the IASC / LAFC, IASB, IFRS to become what it is today. If a country uses IFRS, it means that the country has adopted the financial reporting systems that apply globally to allow world markets understanding the financial statements of companies in such country.

Adoption strategies undertaken for the convergence of two kinds are big bang strategy and the gradual strategy. Big bang strategy fully adopts IFRS at once, without going through the stages. This strategy is used by developed countries, while the gradual strategy, an adoption of IFRS, is used by developing countries such as Indonesia. IFRS implementation of an enterprise must be started from financial statements prepared under local accounting principles (local GAAP).

DSAK-IAI is doing the convergence of IFRS with a targeted completion in 2012. IFRS Convergence is one of the Indonesian government agreements as a member of the G-20 forum. G20 meeting in London on 2nd of April 2009 producing 29 agreements. Number 13 to 16 of the agreement is about Strengthening Financial Supervision and Regulation, Number 15 stipulated: "to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality global accounting standards".

Keywords: *History, Adoption, Implementation, Impact, Education and Business Entities.*

I. PENDAHULUAN

Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambil keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan karena adanya globalisasi, baik lingkungan bisnis yang pertumbuhannya baik, stagnasi maupun depresi. Setiap negara mempunyai standar akuntansi yang berbeda dengan negara lain, karena berbagai faktor: kondisi ekonomi, ideologi ekonomi yang dianut, kondisi politik dan sosial di setiap negara.¹ Transaksi antar negara, dan prinsip-prinsip

¹ Arya Sadjiarto, "Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standarisasi", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 2, 1999, h. 144-161.

akuntansi yang berbeda mengakibatkan munculnya kebutuhan akan standar akuntansi secara internasional. Muncullah organisasi *International Accounting Standard Board* (IASB) yang mengeluarkan *International Financial Reporting Standard* (IFRS), dijadikan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan di berbagai negara. Masalah selanjutnya adalah penerapan IFRS di masing-masing negara dengan perbedaan lingkungan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.

Alasan utama penyajian laporan keuangan yang memenuhi standar adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri di masa depan, ditinjau dari segi pengguna internal dan eksternal. Pengakuan publik akan kelengkapan dan ketransparanan laporan keuangan sebuah perseroan terbuka meningkatkan tekanan sektor bisnis untuk menyediakan laporan keuangan yang *compatible* dan sesuai standar.²

IAI sebagai anggota *the International Federation of Accountant (IFAC)*, hadir menyampaikan presentasi pada acara *G-20 Accountancy* di London. Tujuannya adalah membahas tindakan agar ekonomi global cepat keluar dari krisis. Terdapat rekomendasi yang terkait dengan dunia akuntansi antara lain perlu standar akuntansi internasional yang berlaku secara global untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Para peserta sepakat bahwa kepentingan publik terbaik akan dilayani oleh satu set berkualitas tinggi pelaporan, berbasis prinsip keuangan dan standar audit untuk entitas kepentingan terdaftar dan publik. Selain itu, peserta KTT dipanggil pemerintah untuk mengikuti standar tinggi yang sama pelaporan keuangan sebagai mitra sektor swasta mereka dan mengadopsi Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional. IFAC sendiri telah menyampaikan 8 butir rekomendasi untuk merespons *working Group 1 G-20* yaitu:

1. Perlunya adopsi *International Standards on Auditing*,
2. Mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip *corporate governance* OECD,
3. Perlunya pengembangan dan penyebarluasan panduan implementasi atas semua standar global yang akan diadopsi/diterapkan,
4. Perlunya dibangun suatu standar kompetensi internasional bagi pejabat keuangan senior yang menangani kepentingan entitas publik,

² Intan Immanuela, "Adopsi Penuh dan Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional." *Jurnal Ilmiah Widya Warta*, Vol. 33, No. 1, 2009, h. 69-75.

5. Memperbaiki *enterprise risk management system* dan skema remunerasi di perusahaan
6. Melakukan advokasi pelaksanaan model tata kelola yang berkualitas tinggi untuk semua institusi internasional yang menetapkan peraturan di bidang keuangan,
7. Mengadopsi Internasional *Public Sector Accounting Standards*, serta
8. Mengakui pentingnya sektor usaha kecil dan menengah.

Konvergensi IFRS ke PSAK akan berdampak besar bagi dunia usaha, terutama pada sisi pengambilan kebijakan perusahaan yang didasarkan kepada data-data akuntansi, pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, sistem IT, sumber daya manusia, dan sistem organisasi perusahaan. Pertanyaannya, bagaimana kebutuhan ini dapat terpenuhi jika perusahaan-perusahaan masih menggunakan bentuk dan prinsip pelaporan keuangan yang berbeda? IFRS, merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi berbasis prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan *disclosures* yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas antarnegara di berbagai belahan dunia.

Implikasinya, mengadopsi IFRS berarti mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global sehingga perusahaan dapat dimengerti oleh pasar global, karena perusahaan akan memiliki daya saing lebih besar. Perkembangan IFRS merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan Standar Akuntansi Keuangan. Konvergensi IFRS diharapkan akan mengurangi hambatan investasi, meningkatkan transparansi perusahaan, mengurangi biaya penyusunan laporan keuangan, dan mengurangi *cost of capital*.

Indonesia akan memberlakukan standar akuntansi keuangan dengan menggunakan standar akuntansi internasional (IFRS), untuk itu IAI telah mencanangkan program konvergensi IFRS yang akan diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 2012. Kementerian BUMN juga telah menetapkan seluruh BUMN untuk wajib mengimplementasikan PSAK konvergensi IFRS secara penuh mulai tahun buku 2012, PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan entitas bisnis lainnya yang memasuki dunia pasar modal global.

II. TINJAUAN TEORITIS

Di Indonesia sendiri sejak tahun 1994, sebenarnya telah mengadopsi sebagian besar IAS. Diawali tahun 1973-1984, IAI membentuk Komite Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Pada tahun 1984-1994, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang akhir 1994, Komite memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut, yang menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan IASB.

Di tahun 1994-2004, perubahan kiblat dari US GAAP ke IFRS mulai terjadi di Indonesia. Sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan IAS sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia. Di tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru, kebanyakan konsisten dengan IAS. Pertengahan Agustus 2004, Dirjen Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai mengundang DPN-IAI, kompartemen IAI, DSAK-IAI, DSPAP-IAI KAP, Bapepam, KSAPPD untuk mendiskusikan kesiapan profesi akuntan melakukan konvergensi standar yang berlaku internasional. Sebagai *full member* dari IFAC, IAI berkewajiban memenuhi butir-butir *Statements of Membership Obligation (SMO)* diantaranya penerapan IFRS. Dari hasil diskusi dicapai kesepakatan bahwa penyusunan SAK tidak berubah. Penyusunan SAK mengacu ke IAS yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.³

Pada tahun 2006-2008, Konvergensi IFRS Tahap 1 dilaksanakan. Tahun 1995 - 2010, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi berupa penyempurnaan dan penambahan standar baru, yang dilakukan sebanyak enam kali (1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009). Pada kongres IAI, 2006 di Jakarta ditetapkan konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008, dengan target saat penuh dengan semua standar IFRS. Namun, sampai akhir tahun 2008, yang diadopsi baru 10 standar dari total 33 standar

³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Edisi Revisi 1 Juli 2009*. (Jakarta: Salemba 4, 2009).

IFRS. Seiring tahap konvergensi, IAI telah mencanangkan adopsi penuh IFRS di Indonesia dan mencrapkannya pada tahun 2012.⁴ Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan 29 kesepakatan, dimana kesepakatan nomor 13-16 tentang *Strengthening Financial Supervision and Regulation*. Pada kesepakatan ke-15 dikatakan:

"to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality global accounting standards."

Adopsi IFRS dilakukan dengan dua cara; cara sekaligus (pendekatan *big bang*) dan dengan cara *gradual*. *Big bang* strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan tertentu, digunakan oleh negara-negara maju. Cara ini berdampak drastis terhadap laba dan sistem akuntansi perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Singapura, Australia, Selandia Baru yang memilih pendekatan *big bang* menghadapi koreksi besar-besaran pada tahun pertama penerapan IFRS. Sedangkan pada *gradual strategy*, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap, digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sesuai dengan *roadmap* konvergensi PSAK ke IFRS, Indonesia telah memasuki tahap persiapan akhir (2011), setelah tahap adopsi (2008 – 2010) seperti pada tabel berikut. IAI menargetkan tahap persiapan akhir ini hanya setahun, karena per 1 Januari 2012 Indonesia resmi menerapkan IFRS.

Tabel 2.1. Tahapan Konvergensi IFRS di Indonesia

Tahap Adopsi (2008-2010)	Tahap Persiapan Akhir (2011)	Tahap Implementasi (2012)
<ul style="list-style-type: none"> Adopsi seluruh IFRS ke PSAK 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap
<ul style="list-style-type: none"> Persiapan infrastruktur yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif
<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan kelola dampak dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku 		

Sumber: *Proposal Konvergensi IFRS yang dikeluarkan oleh IAI, 2008*

Dari ketiga tahap tersebut di atas, tahap adopsi dilakukan dengan cara adopsi satu persatu IFRS dan IAS:

⁴ <http://warta.warga.guna.darma.ac.id/2011/03/jurnal-konversi-standar-akuntansi-psak-ke-ifrs-international-financial-reporting-standards/>

IFRS dan IAS yang telah diaopsi hingga 31 Desember 2008, sebagai berikut :

- IAS 2 : "Inventories"
- IAS 16 : "Property, Plant and Equipment"
- IAS 17 : "Leases"
- IAS 19 : "Employee Benefits"
- IAS 23 : "Borrowing Costs"
- IAS 32 : "Financial Instruments – Presentation"
- IAS 39 : "Financial Instruments – Recognition and Measurement"
- IAS 40 : "Investment Property"

IFRS dan IAS yang akan diadopsi hingga 31 Desember 2009, sebagai berikut :

- IFRS 2 : "Share-based Payment"
- IFRS 5 : "Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations"
- IFRS 7 : "Financial Instrument – Disclosures"
- IFRS 8 : "Segment Reporting"
- IAS 1 : "Presentation of Financial Statement"
- IAS 8 : "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
- IAS 21 : "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate"
- IAS 27 : "Consolidated and Separate Financial Statement"
- IAS 28 : "Investment in Associates"
- IAS 31 : "Interests in Joint Ventures"
- IAS 36 : "Impairment of Assets"
- IAS 37 : "Provisions, Contingent Liabilities and Contongent Assets"

IFRS dan IAS yang akan diadopsi hingga 31 Desember 2010, adalah:

- IFRS 3 : "Business Combination"
- IFRS 4 : "Insurance Contract"
- IFRS 6 : "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources"
- IAS 7 : "Cash Flow Statement"
- IAS 10 : "Event after the Reporting Period"
- IAS 11 : "Construction Contract"
- IAS 12 : "Income Taxes"
- IAS 18 : "Revenues"
- IAS 19 : "Employee Benefit"
- IAS 20 : "Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance"
- IAS 24 : "Related Party Disclosures"
- IAS 26 : "Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans"
- IAS 29 : "Financial Reporting in Hyperinflationary Economies"
- IAS 33 : "Earnings per Share"
- IAS 34 : "Interim Financial Reporting"
- IAS 38 : "Intangible Asset"
- IAS 41 : "Agriculture"

Jika dibandingkan antara semua standar akuntansi yang dimiliki Indonesia dengan standar dan *interpretations* IFRS 1 Januari 2011, ditemukan perbedaan kuantitas berikut:⁵

Tabel 2.2. Tahapan Konvergensi IFRS di Indonesia

PSAK	IFRS
<ul style="list-style-type: none"> • 43 Standards (PSAK) • 8 Syariah Standard • 11 Interpretation (ISAK) • 4 Technical Bulletins • 1 SAK ETAP (Entitas tanpa akuntabilitas publik/UKM) 	<ul style="list-style-type: none"> • 37 Standards • 9 IFRS • 29 IAS • 27 Interpretation • 15 IFRIC Interpretation • 8 SIC

Riset Roy Iman Wirahardja, Wakil Ketua DSAK-IAI (12 Oktober 2010), mengungkapkan beberapa progres konvergensi IFRS selama 2009-2010, yaitu 15 PSAK telah disahkan (Juni 2009-Juni 2010), semuanya berlaku 2011 kecuali PSAK 10 berlaku 2012 namun penerapan dini diijinkan. Bila asumsi ED PSAK 3 dan ED ISAK 17 disahkan dalam waktu dekat, maka jumlah PSAK berlaku efektif 2012 adalah 15 buah dan ISAK 7 buah. Jumlah PSAK yang belum disahkan dan akan berlaku Juni 2012 dan ISAK adalah 5 buah, sedang yang masih *Non Comparable* dengan IFRS adalah 8 buah.⁶ Jumlah PSAK yang telah dicabut berlaku sejak 2010 adalah 9 PSAK dan 1 Interpretasi. Beberapa PSAK juga telah dicabut bersamaan berlakunya PSAK baru sehingga totalnya 16 PSAK.⁷

Tabel 2.3. Rincian PSAK Non-Comparable per 31 Maret 2010

No	PSAK	Posisi DSAK per Agustus 2010
1	a. PSAK 21 Ekuitas	a. Akan Dicabut
2	b. PSAK 27 Akuntansi Korporasi	b. Akan Dicabut
3	c. PSAK 38 Restrukturisasi Entitas Sepengendali	c. Not Decided
4	d. PSAK 44 Aktivitas Pengembangan Real Estate	d. Not decided, kemungkinan diganti IFRIC 15
5	e. PSAK 51 Kuasi Reorganisasi	e. Not Decided

⁵ <http://dwipw.wordpress.com/2011/04/03/konversi-psak-ke-ifs/>

⁶ <http://jimmy-januar.blogspot.com/2011/03/konvergensi-ifs.html>

⁷ <http://mikhaanitaria.blogspot.com/2011/05/konvergensi-psak-ke-ifs.html>

6	f. PSAK 45 Akuntansi Entitas Nirlaba	f. Direvisi
7	g. PSAK 47 Akuntansi Tanah	g. Not Decided
8	h. PSAK 39 Akuntansi Kerja Sama Operasi	h. Not Decided

Tabel 2.4. Rincian PSAK Substantially Non Comparable per 31 Maret 2010.

No.	PSAK	Posisi DSAK per Agustus 2010
1	a. PSAK 3 Laporan Keuangan Interim	a. ED PSAK 3 (R 2010) sudah terbit
2	b. PSAK 18 Akuntansi Dana Pensiun	b. ED PSAK 18 (R 2010) sudah terbit
3	c. PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian & Pengungkapan	c. ED PSAK 50 and 60 (R 2010 sudah terbit)
4	d. PSAK 53 : Kompensasi Berbasis Saham	d. ED PSAK 53 (R 2010) sudah terbit
5	e. PSAK 36 : Akuntansi Asuransi Jiwa	e. Not decided
6	f. PSAK 28 : Akuntansi Asuransi Kerugian	f. Not decided
7	g. PSAK 29 : Akuntansi Minyak dan Gas Bumi	g. Not decided
8	h. PSAK 33: Akuntansi Pertambangan Umum	h. Not decided

14 PSAK disahkan 23 Desember 2009- 30 Juni 2011 (Berlaku tahun 2011):

1. PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 2 (revisi 2009) : Laporan Arus Kas
3. ED PSAK 3 : Laporan Keuangan Interim
4. PSAK 4 (revisi 2009) : Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
5. PSAK 5 (revisi 2009) : Segmen Operasi
6. PSAK 12 (revisi 2009) : Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
7. PSAK 15 (revisi 2009) : Investasi Pada Entitas Asosiasi
8. PSAK 25 (revisi 2009) : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
9. PSAK 48 (revisi 2009) : Penurunan Nilai Aset
10. PSAK 57 (revisi 2009) : Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
11. PSAK 58 (revisi 2009) : Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
12. PSAK 19 (2010) : Aset Tidak berwujud
13. PSAK 23 (2010) : Pendapatan
14. PSAK 7 (2010) : Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi
15. PSAK 22 (2010) : Kombinasi Bisnis

Interpretasi Disahkan 23 Desember 2009 – 30 Juni 2010, berlaku tahun 2011:

1. ISAK 7 (revisi 2009) : Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus

2. ISAK 9 : Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa
3. ISAK 10 : Program Loyalitas Pelanggan
4. ISAK 11 : Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
5. ISAK 12 : Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non moneter oleh Venturer
6. ISAK 14 (2010) : Aset Tak Berwujud
7. ED ISAK 17 : Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

Demikian pula yang diungkapkan oleh Simbolon, H.A, dalam hasil risetnya mengenai "Perkembangan Konvergensi PSAK ke IFRS" (6 Januari 2011).

Tabel 2.5. PSAK yang Berlaku Efektif per 1 Januari 2012

No	PSAK	Ref
1	PSAK 8 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca	IAS 10 Event After Balance Sheet Date
2	PSAK 10 Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing	IAS 21 The Effect of Change in Foreign Exchange Rates
3	PSAK 34 Akuntansi Kontrak Konstruksi	IAS 11 Construction Contract
4	PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan	IAS 12 Income Taxes
5	PSAK 24 Imbalan Kerja	IAS 19 Employee Benefit
6	PSAK 18 Akuntansi & Pelaporan Program Manfaat Purnakarya	IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
7	PSAK 56 Laba per Saham	IAS 33 Earnings per Share
8	PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham	IFRS 2 Share-based payment
9	PSAK 28 Akuntansi Kerugian	IFRS 4 Insurance Contract
10	PSAK 36 Akuntansi Akuntansi Jiwa	
11	PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi	IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
12	New PSAK (ED PSAK 60)	IFRS 7 Financial Instrument: Disclosure
13	New PSAK (ED PSAK 61)	IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Grant
14	New PSAK (ED PSAK 63)	IAS 29 Financial Reporting in Hyper Inflationary
15	New PSAK	IAS 41 Agriculture

Tabel 2.6. ISAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2012

No	ISAK	Ref
1	ISAK 13 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri	IFRIC 16 Hedges of Net Investment in a Foreign Operation
2	ED ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa	IFRIC 12 Service Concession Arrangements
3	ED ISAK 15 PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan	IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined benefit Asset,

	Minimum dan Interaksinya	Minimum Funding Requirement and their Interaction
4	ED ISAK 17 Laporan keuangan Interim dan penurunan Nilai	IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment

Tabel 2.7. PSAK Akan Dicabut, Dikaji Dan Direvisi Berlaku Efektif Per 1 Januari 2012

No	PSAK	Ref
1	PSAK 21 Ekuitas	Akan dicabut
2	PSAK 27 Akuntansi Koperasi	Akan dicabut
3	PSAK 38 Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Masih dikaji
4	PSAK 44 Aktivitas pengembangan Real Estat	Masih dikaji, kemungkinan diganti IFRIC 15
5	PSAK 51 Kuasi Reorganisasi	Masih dikaji
6	PSAK 45 Akuntansi Entitas Nirlaba	Direvisi
7	PSAK 47 Akuntansi Tanah	Masih dikaji
8	PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi	Masih dikaji

Di Indonesia juga masih terdapat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang masih mengacu pada PSAK lama. Kemungkinan besar setelah konvergensi PSAK ke IFRS akan menyusul perubahan pada SAP. Tidak semua standar IFRS tersebut di atas dicontek dan dirubah menjadi PSAK, karenanya IAI memilih konvergensi daripada *adaption* dan *adoption*. Pernyataan Indra Wijaya Kusuma berikut lebih tepat menjelaskan istilah konvergensi bagi Indonesia:⁸

"Indonesia mengadopsi secara penuh seperti Australia sangat tidak mungkin, adopsi yang mungkin adalah mengadopsi IFRS berkarakteristik Indonesia yang lebih bersifat taylor-made namun memenuhi kebutuhan internasional serta dapat melepaskan diri dari tekanan dunia internasional".

Saat ini, berdasarkan data dari IASB, terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dalam pelaporan keuangan entitas di negaranya, dengan keharusan yang berbeda-beda. Sebanyak 23 negara mengizinkan penggunaan IFRS secara

⁸ Indra Wijaya Kusuma, "Pengadopsian International Financial Reporting Standards: Implikasi Untuk Indonesia", orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2009.

sukarela, 75 negara mewajibkan untuk perusahaan domestik secara keseluruhan, dan empat (4) negara mewajibkan hanya untuk perusahaan domestik tertentu.⁹

III. METODE PENELITIAN

Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yaitu memaparkan serta mengkaji dampak penerapan dengan cara mengadopsi penuh *International Standard Financial Report* (IFRS) terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) oleh kalangan bisnis di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga memaparkan beberapa perubahan pada PSAK tersebut.

IV. PEMBAHASAN

Terdapat beberapa manfaat dalam penerapan konvergensi IFRS: memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan SAK secara internasional (*enhance comparability*), meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang *fund raising* melalui pasar modal, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Namun, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian manajemen dalam implementasi IFRS: konsekuensi perpajakan, legal, sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk perpajakan, manajemen perusahaan harus melakukan daftar peraturan perpajakan yang mungkin mengalami benturan dengan IFRS,¹⁰ seperti PMK RI No. 79/PMK.03/2008, tanggal 23 Mei 2008, "Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan" yang berlaku efektif sejak 23 Mei 2008. PMK RI No.79/PMK.03/2008 mengharuskan revaluasi aktiva tetap dikenakan pajak.¹¹ Disamping masalah perpajakan, perusahaan juga harus mempertimbangkan benturan legal dalam menerapkan IFRS, misalnya Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang "Badan Hukum Milik Negara" pasal 4 ayat 2: penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN dapat bersumber dari keuntungan revaluasi aktiva.

Isu pelaporan keuangan adalah isu sentral yang harus diperhatikan pada saat melakukan implementasi IFRS. Pelaporan keuangan mencakup proses dan output

⁹ <http://informasi-seminar.com/konvergensi-psak-ifs-sebagai-langkah-pemantapan-dalam-persiapan-penerapan-ifs/>

¹⁰ <http://www.bpkp.go.id/dan/berita/read/5953/0/Workshop-Konvergensi-PSAK-terhadap-IFRS.bpkp>

¹¹ Marisi Purba, *International Financial Reporting Standard*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

pelaporan keuangan itu sendiri. Sistem informasi akuntansi harus disesuaikan dengan IFRS, serta proses pengukuran dan penilaian aktiva dan kewajiban banyak mengalami perubahan.¹² Penerapan IFRS pada suatu perusahaan harus dilakukan berawal dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi lokal, dilakukan dengan dua cara:

1. Rekonsiliasi terhadap laporan keuangan yang disusun berdasarkan lokal GAAP sehingga sesuai dengan IFRS.
2. Menyusun laporan keuangan secara terpisah dengan langsung mengacu kepada IFRS.

Penerapan IFRS berdampak terhadap perusahaan dalam banyak hal. Aspek pelaporan interim dan basis penilaian adalah hal yang paling banyak terkena dampak. Penerapan IFRS dengan cara adopsi penuh, hal yang paling signifikan yang harus diperhatikan adalah koreksi laba ditahan sebagai akibat penerapan pertama dari IFRS. Efeknya bisa mengurangi laba atau sebaliknya justru bisa menambah laba. Sasaran konvergensi IFRS tahun 2012 adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009, yang berlaku efektif tahun 2011-2012.¹³

Kovergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap. Sepanjang tahun 2009, DSAK-IAI telah mengesahkan 10 PSAK baru, 5 ISAK, dan mencabut 9 PSAK berbasis industri dan mencabut 1 ISAK. Indonesia akan mengadopsi IFRS secara penuh pada 2012 nanti. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Namun, perubahan tersebut akan memberikan efek di berbagai bidang, terutama dari segi pendidikan dan bisnis.¹⁴ Beberapa kendala dalam adopsi IFRS ke PSAK:

- a. Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya
- b. IFRS berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih dilakukan, pihak IASB sudah dalam proses mengganti IFRS tersebut.
- c. Infrastruktur profesi akuntan yang belum siap. Untuk mengadopsi IFRS banyak metode akuntansi yang baru yang harus dipelajari lagi oleh para akuntan.

¹² <http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm> (© 2011 IFRS Foundation) 1 Januari 2011

¹³ <http://akuntansibisnis.wordpress.com/2011/06/perkembangan-konvergensi-psak-ke-ifrs/>

¹⁴ <http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/FCAG+letter+to+IG-20+leaders.htm>

- d. Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS.
- e. *Support* pemerintah terhadap isu konvergensi.

Beberapa kendala menjadi penghambat penerapan IFRS sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan di dunia hingga saat ini, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor: sistem hukum dan politik, sistem perpajakan dan fiskal, nilai-nilai budaya korporasi, sistem pasar modal dan peraturan terkait dengan kepemilikan korporasi, kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis, teknologi. Berdasarkan hasil riset Radebaugh dan Gray, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara-negara di dunia di bagi lima kelompok: sistem akuntansi Anglo-Saxon, Germanic, Nordic, Latin, dan Asia. Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya korporasi, sistem hukum, politik, dan perpajakan. IFRS dikembangkan dengan banyak mengacu kepada sistem akuntansi Anglo-Saxon yang banyak diadopsi negara-negara bekas koloni Inggris.

Ada tiga permasalahan utama dihadapi Indonesia dalam adopsi penuh IFRS. Pertama, kurang siapnya infrastruktur seperti DSAK sebagai *financial accounting standard setter* di Indonesia. Kedua, kondisi peraturan perundangan-undangan yang belum tentu sinkron dengan IFRS. Ketiga, kurang siapnya sumber daya manusia dan dunia pendidikan di Indonesia. Selain, permasalahan implementasi ini, terdapat pula dampak yang harus dialami oleh Indonesia:

- a. Mahasiswa harus belajar tentang konsep yang ada *Conceptual framework*.
- b. Mahasiswa harus menguasai teori-teori yang mendasari pelaporan keuangan: ekonomi makro, keuangan, portofolio, dll.
- c. Mahasiswa harus menguasai *valuation theory*.
- d. Mahasiswa harus belajar membuat *judgments* (memahami BC dalam setiap standar).
- e. Pembentukan IFRS *Task Force*.
- f. Kajian-kajian dan riset mengenai IFRS.
- g. Pengajaran *principle based*, bukan *rule based* dan pengungkapan berdasarkan IFRS.
- h. Penggunaan *text book* berbasis IFRS.
- i. Pengetahuan mengenai pengungkapan berdasarkan IFRS.
- j. Pemutakhiran materi ajar terutama untuk mata kuliah yang terkena dampak besar dari konvergensi IFRS.

- k. Mata kuliah yang terkena dampak paling besar: akuntansi keuangan menengah, teori akuntansi, akuntansi internasional, akuntansi keuangan lanjutan, seminar akuntansi /akuntansi topik khusus, statistika akuntansi, dan metodologi penelitian

Selain dampak terhadap dunia pendidikan IFRS juga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap dunia bisnis. Berikut ini adalah berbagai dampak yang ditimbulkan dari program konvergensi IFRS yang disampaikan dalam seminar IAI "Dampak konvergensi IFRS terhadap Bisnis" tanggal 28 Mei 2009 :¹⁵

1. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global.
2. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar.
3. Kinerja keuangan (laporan laba rugi) lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif.
4. *Smoothing income* semakin sulit menggunakan *balance sheet approach* dan *fair value*.
5. *Principle-based standards* mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun, bila *professional judgment* ditumpangi kepentingan untuk mengatur laba (*earning management*).
6. Penggunaan *off balance sheet* semakin terbatas.

Dampak IFRS terhadap Sistem Akuntansi dan Pelaporan:

1. Konsep *Other Comprehensive Income* di dalam laba rugi komprehensif
2. Perubahan definisi-definisi seperti Kewajiban menjadi Liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan nonpengendali (*non-controlling interest*)
3. Pos Luar Biasa tidak lagi diperbolehkan
4. Perubahan nama laporan keuangan
5. Tidak diatur tentang format laporan
6. *Prudence vs Conservatism*
7. Dibolehkan menggunakan *Revaluation method* untuk penilaian PPE

Berikut merupakan satu set lengkap laporan keuangan menurut IFRS terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi komprehensif untuk periode

¹⁵ <http://dederudi.wordpress.com/2010/04/19/dampak-konvergensi-ifrs-di-indonesia/>

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas untuk periode
5. Catatan, terdiri dari ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi jelas lainnya
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif paling awal ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat pernyataan ulang retrospektif item dalam laporan keuangan, atau ketika *reclassifies item* dalam laporan keuangan

Pengukuran dan Pengungkapan dalam *Financial Statement*:

1. Peningkatan penggunaan nilai wajar (*fair value*)
Standar IFRS lebih condong ke penggunaan nilai wajar, terutama untuk properti investasi, beberapa aset tak berwujud, aset keuangan, dan aset biologis. Jadi, diperlukan sumber daya yang kompeten untuk menghitung nilai wajar bahkan perlu menyewa jasa konsultan penilai terutama untuk aset-aset yang tidak memiliki nilai pasar aktif.
2. Penggunaan estimasi dan "*judgement*"
Akibat karakteristik IFRS yang lebih berbasis prinsip, akan lebih banyak dibutuhkan "*judgement*" untuk menentukan bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat.
3. Persyaratan pengungkapan yang lebih banyak dan lebih rinci
IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data/informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen.

V. PENUTUP

Deklarasi konvergensi terhadap IFRS ini, maka tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI akan mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas. DSAK juga akan menerbitkan *eksposur draft* SAK UKM, yang akan menjadi acuan bagi UKM dalam mencatat dan membukukan semua transaksinya. DSAK juga akan terus mengembangkan SAK untuk memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi syariah, yang terus berkembang di tanah air. Konvergensi terhadap IFRS merupakan *milestone* baru dari serangkaian *milestone* yang pernah dicapai oleh

Indonesia dan IAI dalam sejarah perkembangan profesi akuntansi, khususnya dalam pengembangan standar akuntansi keuangan.

Di samping manfaat yang akan diperoleh dalam mengadopsi IFRS, implementasi dalam adopsi IFRS tersebut bukan tanpa masalah, terdapat beberapa kendala yang harus dialami oleh negara-negara yang sedang melakukan adopsi IFRS termasuk Indonesia, begitu pula dampaknya yang berimbas terhadap dunia bisnis dan dunia pendidikan khususnya akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjasmoro, Mega. *Adopsi International Financial Report Standard. Kebutuhan atau Paksaan*. FE. UNDIP, 2010.
- Immanuela, Intan. "Adopsi Penuh dan Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional." *Jurnal Ilmiah Widya Warta*. Vol. 33, No. 1, h. 69-75, 2009.
<http://dwipw.wordpress.com/2011/04/03/konversi-psak-ke-ifrs/>
<http://mikhaanitaria.blogspot.com/2011/05/konvergensi-psak-ke-ifrs.html>
<http://jimmy-januar.blogspot.com/2011/03/konvergensi-ifrs.html>
<http://informasi-seminar.com/konvergensi-psak-ifrs-sebagai-langkah-pemantapan-dalam-persiapan-penerapan-ifrs/>
<http://www.bpkp.go.id/dan/berita/read/5953/0/Workshop-Konvergensi-PSAK-terhadap-IFRS.bpkp>
<http://akuntansibisnis.wordpress.com/2011/01/06/perkembangan-konvergensi-psak-ke-ifrs/>
<http://dederudi.wordpress.com/2010/04/19/dampak-konvergensi-ifrs-di-indonesia/>
<http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/FCAG+letter+to+G-20+leaders.htm>
<http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm> (© 2011 IFRS Foundation) 1 Januari 2011
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Edisi Revisi 1 Juli 2009*. Salemba 4. Jakarta, 2009.
- Kusuma, Wijaya, Indra. *Pengapdosian International Financial Reporting Standards: Implikasi Untuk Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM. 2009.
- Purba, Marisi. *International Financial Reporting Standard*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sadjiarto, Arya. Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standarisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 2, h. 144-161, 1999.